



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUL MA'ARIF
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 109882

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 460.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/102 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 298 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 629 m2 di LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 160.000.000**

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1973, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 156.650.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 44.489.708**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 821.139.708**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 821.139.708**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.